

Tinjauan Mata Kuliah

Kebijakan Publik sebagai sebuah kajian ilmiah relatif masih muda usianya bila kita bandingkan misalnya dengan kajian ilmu politik, sosiologi, bahkan ilmu pemerintahan ataupun administrasi publik. Kebijakan Publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi publik, baik sebagai ilmu maupun sebagai praktek, telah mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan perkembangan administrasi publik itu sendiri.

Kebijakan Publik sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sifat yang sangat unik, berbeda dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Keunikannya terletak pada karakternya yang multidisipliner (gabungan dari pelbagai ilmu), multimetode (menggunakan pelbagai metode), dan menggabungkan antara fakta dan nilai. Implikasi atau akibat dari sifat ilmu kebijakan publik tersebut maka mereka yang mempelajari atau mengkajinya dipaksa harus mempelajari banyak disiplin ilmu yang berpengaruh terhadap ilmu kebijakan publik, seperti misalnya ilmu politik, sosiologi, ekonomi, administrasi publik, psikologi sosial, geografi, demografi, teknologi, matematika dan seterusnya.

Kajian Kebijakan Publik sebagai praktik juga sama kompleksnya dengan kajian keilmuan. Kalau kita misalnya akan mengkaji kebijakan publik tentang program 'Pengentasan Kemiskinan' maka kacamata yang utama yang akan kita pakai adalah kacamata ekonomi, tetapi juga kacamata lainnya (politik, sosial, budaya, hukum, dan seterusnya) memainkan peran yang tidak kalah penting. Hal ini juga sekaligus menuntut kita untuk mendalami berbagai macam pendekatan agar kajian yang kita lakukan dapat membuahkan hasil yang baik.

Ada beberapa macam pendekatan yang bisa dipakai untuk mengkaji kebijakan publik, di antaranya adalah pendekatan proses. Pendekatan ini banyak penganutnya, tetapi juga penentangannya karena memang pendekatan ini mempunyai sisi kekuatan dan kelemahan. Modul ini juga mencoba ingin melihat pendekatan proses terutama yang terjabarkan dalam berbagai aktivitas kebijakan publik seperti proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Setidaknya dengan pendekatan ini mahasiswa akan kenal dan memahami bagaimanakah proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan secara lebih utuh dan menyeluruh.

Sesuai dengan perkembangan paradigma administrasi publik yang lebih demokratis maka proses kebijakan (formulasi, implementasi, dan evaluasi)

pun juga mengarah kepada pemenuhan tuntutan agar rakyat atau publik diikuti sertakan dalam proses kebijakan tersebut. Muncullah kemudian istilah-istilah kebijakan partisipatoris, kebijakan deliberatif, kebijakan diskursif, dan sebagainya. Kesembilan modul yang telah tersaji ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan awal bagi para mahasiswa tentang proses Kebijakan Publik dengan harapan mereka mau dan mampu menambah pengayaan ilmunya lewat kegiatan mandiri, lewat multimedia yang tersedia misalnya buku teks, CD ROM, eJournal, dan sebagainya.

Sebagai pembuka, tentunya saya ingin mengajak Anda untuk mengenali kajian tentang kebijakan publik ini dengan menyajikan beberapa ragam definisi dan makna kebijakan publik. Setelah memahami arti kebijakan publik kemudian saya lanjutkan dengan menjelaskan beberapa macam model atau pendekatan yang sering digunakan oleh para ilmuwan ataupun praktisi kebijakan untuk mengkaji kebijakan publik. Pemahaman Anda tentang kebijakan publik akan menjadi lebih mendalam ketika Anda saya ajak untuk mencermati kebijakan publik sebagai sebuah proses baik yang ‘teknokratis’ maupun yang ‘politik’.

Secara garis besar kebijakan publik sebagai sebuah proses terdiri dari kegiatan merumuskan, mengimplementasi, serta mengevaluasi hasil dan dampak kebijakan. Dalam modul ini, proses tersebut saya jabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan utama, yakni mengidentifikasi dan merumuskan masalah kebijakan; menyusun kebijakan; memformulasi kebijakan; mengimplementasi kebijakan, serta mengevaluasi hasil dan dampak kebijakan. Kemudian, karena kebijakan publik itu merupakan kegiatan yang dinamis dan dilakukan terus menerus maka pada akhir materi kuliah ini (modul terakhir atau 9) akan saya jelaskan mengenai perubahan kebijakan sebagai sebuah upaya reformasi untuk berinovasi memperbaiki mutu kebijakan.

Pemahaman yang utuh terhadap seluruh isi modul ini (1-9) saya harapkan mampu memberikan bekal yang cukup bagi Anda untuk melakukan telaah awal dalam mengkaji kebijakan publik, baik secara ilmiah (bagi pengembangan ilmu) maupun praksis (pengembangan mutu kebijakan publik bagi kepentingan masyarakat luas).

Peta Kompetensi Kebijakan Publik/ADPU4410/3 sks

